

**EFEKTIVITAS KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP PERKEMBANGAN
UMKM DI SURABAYA : PENDEKATAN FENOMENOLOGI**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



OLEH :

HERMUDA MANUSTAMA SARJANA BUDI SANTOSO

2013310158

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2017

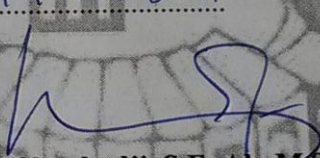
PENGESAHAN ARTIKEL SKRIPSI

Nama : Hermuda Manustama Sarja Budi Santoso
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 18 Oktober 1995
N.I.M : 2013310158
Program Studi : Akuntansi
Program pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan
Judul : Efektivitas Keuangan Inklusif Terhadap Perkembangan
Umkm Di Surabaya : Pendekatan Fenomenologi

Disetujui dan diterima baik oleh :

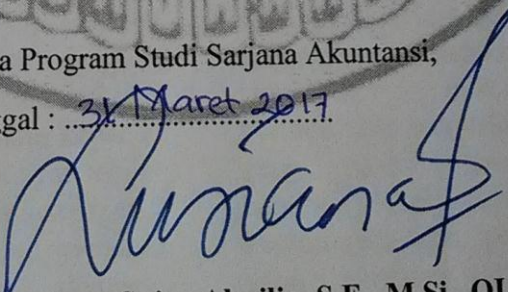
Dosen Pembimbing,

Tanggal : 27 Maret 2017


(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,

Tanggal : 31 Maret 2017


(Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA, CPSAK)

EFEKTIVITAS KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI SURABAYA : PENDEKATAN FENOMENOLOGI

Hermuda Manustama Sarjana Budi Santoso

STIE Perbanas Surabaya

Email : hermuda.msbs@gmail.com

Jl. Wonorejo Permai Utara III No. 16 Surabaya 60296, Jawa Timur

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how effective financial programs inclusive as a program that seeks the introduction of financial services banking to MSMEs in Surabaya, analyzing developments perceived SME users financial services banking or not, find out the reason and perception SME service users or not the banking financial services. This research is a qualitative research with phenomenological approach. Data collection techniques or information is by way of interviews, and observation. Limitations in this study are some of the SMEs in Surabaya good conduct in banking and finance is not, as well as SMEs in all sectors. The conclusions of this study, that some programs that are inclusive finance in Boost by the government have applied but have not been effective. Evident of some SMEs that have not been funded by a loan and stating that the lack of approach between the banks and SMEs. Development of a business is not determined where the capital gain, rather than good management, as well as some things that make small businesses are reluctant to make loans in bank capital is the perception complicated and difficult when using a loan from a bank (the lack of education on financial services).

Key Words: *Inclusive Finance Program, Development of SMEs*

PENDAHULUAN

Hanya sekitar 19% masyarakat di Indonesia yang mampu untuk melakukan akses layanan keuangan secara tepat dan benar. Sedangkan jasa layanan keuangan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan perekonomian di Indonesia (Sari, 2014). Usaha untuk mewujudkan kemudahan dalam akses layanan untuk setiap lapisan masyarakat biasanya disebut dengan keuangan inklusif. Keuangan inklusif ini lebih dipergunakan atau ditujukan kepada masyarakat *in bottom pyramid* agar lebih muda untuk memanfaatkan jasa keuangan. Yang termasuk dalam *in bottom pyramid* meliputi masyarakat dengan berpendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal didaerah terpencil, masyarakat pinggiran dan buruh yang tidak memiliki

dokumentasi legal (Ismawati, 2016). Keuangan inklusif dapat dilakukan dengan peningkatan peran perbankan dalam memberikan layanan keuangan secara lebih kepada sektor mikro. Keuangan inklusif memberikan manfaat kepada semua sektor seperti kepada masyarakat, regulator, swasta, maupun pemerintah. Keuangan inklusif memberikan manfaat karena keuangan inklusif dapat meningkatkan keefektivan dan keefesienan ekonomi, mendukung kestabilan keuangan, meningkatkan index pertumbuhan manusia, memiliki kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, serta dapat mengurangi kesenjangan dan penurunan pendapatan yang nantinya akan berujung pada pengurangan tingkat kemiskinan dan secara otomatis akan meningkatkan

kesejahteraan bagi masyarakat (Khotimah, 2016). Program keuangan inklusif dapat tercapai jika anggota G20 atau kelompok dua puluh menteri keuangan dan gubernur bank sentral sepakat untuk melakukan peningkatan akses keuangan inklusif dengan mengeluarkan 9 prinsip untuk inovasi keuangan inklusif. Kesembilan prinsip tersebut meliputi kepemimpinan, keragaman, inovasi, perlindungan, pemberdayaan, kerjasama, pengetahuan, proposionalitas, dan kerangka aturan. Dalam menjalankan strateginya, terdapat 6 pilar strategi keuangan inklusif. Keenam pilar tersebut meliputi edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan atau peraturan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen.

Keuangan inklusif tidak akan terlepas dari sektor perbankan. Hal ini terkait karena sektor perbankan merupakan sektor yang menguasai industri keuangan yang kurang lebih sebesar 80% dari sektor-sektor lainnya (Sari, 2014). Sektor perbankan juga dapat berperan sebagai distributor atau perantara antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dengan berbagai macam produk yang ditawarkan oleh pihak perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya tidak terkecuali UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

UMKM merupakan salah satu faktor yang menunjang kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, saat ini UMKM sangat digencarkan oleh pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat. Sektor UMKM dianggap mampu untuk bertahan dalam krisis ekonomi sehingga UMKM dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia (Anggraini, 2013). Selain itu, sektor UMKM juga memiliki potensi untuk menyerap tenaga kerja serta memberikan kontribusi bagi perekonomian

di Indonesia. Dengan potensi yang dimiliki UMKM, diharapkan mampu untuk sedikit membantu permasalahan mengenai ekonomi dan pengangguran yang ada di Indonesia. Namun, salah satu kendala atau tantangan yang di hadapi oleh UMKM baru adalah masalah permodalan. Dari berbagai produk yang ditawarkan oleh perbankan baik itu bank Konvensional maupun bank Syariah akan memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin membuka suatu usaha agar dapat menggunakan pembiayaan atau kredit sesuai dengan yang dibutuhkannya. Sehingga akan timbul kemandirian bagi usaha-usaha kecil yang nantinya dapat membantu perekonomian Indonesia dengan cara pengurangan tingkat pengangguran

KERANGKA TEORISTIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang nomor 20 menyatakan bahwa UMKM memiliki pengertian suatu usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh seorang atau badan dan bukan merupakan cabang atau anak perusahaan, baik dikuasai langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang telah sesuai dengan persyaratan undang-undang. Sedangkan pasal 1 ayat 3 mengemukakan UMKM yaitu:

1. Usaha Mikro
Usaha produktif milik sendiri atau badan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Usaha kecil
Usaha ekonomi produktif perorangan atau badan, bukan termasuk anak perusahaan atau cabang dan menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang sesuai dengan persyaratan undang-undang.
3. Usaha menengah
Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri atau badan, bukan termasuk anak perusahaan atau cabang dengan penghasilan atau pendapatan perbulan

sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditentukan.

Suatu usaha dapat dikatakan UMKM jika memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kriteria yang termasuk dalam kategori UMKM menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 adalah

1. Usaha mikro
 - a. Memiliki kekayaan terhitung bersih tanpa tanah dan bangunan sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
 - b. Serta hasil penjualan selama setahun paling banyak Rp 300.000.000 (tiga Ratus Juta Rupiah)
2. Usaha kecil
 - a. Memiliki kekayaan terhitung bersih tanpa tanah dan bangunan minimal Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
 - b. Serta memiliki penjualan selama setahun minimal Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan maksimal sebesar Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
3. Usaha menengah
 - a. Memiliki kekayaan terhitung bersih tanpa tanah dan bangunan lebih dari Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan maksimal Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)
 - b. Memiliki pendapatan dalam setahun lebih dari Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan maksimal Rp 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah)

Keuangan Inklusif

Kebijakan keuangan Inklusif memiliki definisi suatu pendalaman mengenai lembaga layanan keuangan yang diperuntukkan untuk masyarakat golongan rendah atau sering disebut dengan *in bottom pyramid* agar dapat secara leluasa

atau dapat secara maksimal dalam memanfaatkan lembaga keuangan yang nantinya diharapkan akan memberikan dampak positif berupa penurunan tingkat kemiskinan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat (www.bi.go.id). Atau dengan kata lain keuangan Inklusif merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah yang bersinergi dengan pihak lainnya dengan tujuan untuk meniadakan hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga demi kemudahan seluruh lapisan masyarakat untuk mengakses jasa layanan keuangan sehingga strategi nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan stabilitas keuangan dapat tercapai (Bank Indonesia, 2014:04). Agar strategi keuangan inklusif dapat terlaksana, dibuatlah enam pilar strategi keuangan Inklusif. Keenam pilar strategi keuangan Inklusif meliputi Edukasi Keuangan, Fasilitas Keuangan Publik, Pemetaan Informasi Keuangan, Kebijakan / Peraturan Pendukung, Fasilitas Intermediasi dan Distribusi, serta Perlindungan Konsumen.

1) Edukasi Keuangan

Memiliki tujuan untuk meningkatkan edukasi atau pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan jasa layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan, aspek perlindungan konsumen, dan manajemen resiko. Lingkup edukasi keuangan insklusif meliputi :

- a) Edukasi dan pemahaman tentang berbagai produk dan jasa keuangan
- b) Pemahaman dan kesadaran mengenai manfaat dan resiko produk keuangan
- c) Perlindungan nasabah
- d) Ketrampilan pengelolaan keuangan

2) Fasilitas Keuangan Publik

Peran Pemerintah dalam menyediakan pembiayaan bagi masyarakat baik secara langsung maupun secara bersyarat demi memotivasi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lingkup fasilitas keuangan publik meliputi :

- a) Subsidi dan bantuan social

b) Pemberdayaan masyarakat
c) Pemberdayaan UMKM
3) Pemetaan Informasi Keuangan
Memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang awalnya *unbankable* menjadi *bankable* terlebih bagi kaum miskin namun produktif usaha mikro kecil. Lingkup pemetaan informasi keuangan meliputi :

- a) Peningkatan kapasitas dengan menyediakan pelatihan dan bantuan teknis
 - b) Sistem jaminan alternatif (lebih sederhana dan namun masih memperhatikan resiko terkait)
 - c) Penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana
 - d) Mengidentifikasi nasabah yang potensial
- 4) Kebijakan / Peraturan Pendukung

Agar program keuangan inklusif ini dapat dicapai dan dilaksanakan dengan baik, maka perlu adanya dukungan dan kejasama antara berbagai pihak seperti Pemerintah maupun bank Indonesia serta sektor yang lain. Lingkup Kebijakan/Peraturan Pendukung meliputi :

- a) Kebijakan memotivasi sosialisasi masyarakat produk dan jasa layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- b) Menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- c) Menyusun peraturan penyaluran dana melalui perbankan
- d) Menegakkan dan memperkuat perlindungan hukum untuk konsumen jasa keuangan

5) Fasilitas Intermediasi dan Distribusi
Memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran lembaga jasa keuangan tentang adanya potensial masyarakat dan perluasan jangkauan jasa layanan keuangan. Lingkup Fasilitas Intermediasi dan Distribusi meliputi :

- a) Fasilitas forum untuk memertemukan lembaga keuangan dengan masyarakat produktif untuk mengurangi informasi asimetri

b) Sinergi antara lembaga keuangan untuk peningkatan skala usaha

- c) Mengekplorasi berbagai produk, layanan, jasa, dan saluran distribusi inovasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian

6) Perlindungan Konsumen

Memiliki tujuan untuk menciptakan rasa aman serta menjamin perlindungan bagi masyarakat yang berhubungan dengan lembaga keuangan dalam memanfaatkan produk dan jasa yang disediakan. Komponen pilar Perlindungan Konsumen ini meliputi :

- a) Transparansi produk
- b) Penampungan dan penanganan keluhan masyarakat
- c) Mediasi
- d) Edukasi konsumen

Keuangan Inklusif dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, pihak Pemerintah, maupun pihak Swasta. Itulah alasan mengapa keuangan Inklusif ini perlu dilakukan atau diterapkan di Indonesia. Berbagai manfaat menurut bank Indonesia ialah:

- a. Tingkat efisiensi ekonomi di Indonesia dapat di tingkatkan
- b. Mendukung stabilnya sistem keuangan
- c. Menciptakan potensi pasar baru di dunia perbankan
- d. Mendukung index pertumbuhan manusia di Indonesia
- e. Berperan positif dalam perekonomian lokal
- f. Dapat mengurangi kesenjangan dan jebakan pendapatan rendah yang nantinya akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Kelancaran dan keberlangsungan Keuangan Inklusif ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari bank Indonesia saja melainkan harus adanya *sinergi* atau kerja sama antar berbagai pihak terkait misalnya Pemerintah, Legulator, Kementerian dan lainnya agar usaha pelayanan keuangan bagi masyarakat umum ini dapat tercapai. Keuangan Inklusif dapat diterapkan

dengan menggunakan pendekatan strategi nasional. Pendekatan ini menjangkupi 3 hal yakni penyediaan sarana untuk layanan yang sesuai, penyediaan produk yang cocok bagi konsumen, serta *responsible finance* melalui pembelajaran atau edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Adapun visi dan misi dari keuangan Inklusif yakni :

Visi :

Mewujudkan kemudahan akses dalam sistem keuangan bagi setiap lapisan masyarakat agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, pemerataan pendapatan, serta dapat terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia

Misi :

1. Menjadikan strategi yang ada pada keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan serta kestabilan sistem keuangan di Indonesia
2. Memberikan produk dan jasa keuangan yang sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen
3. Meningkatkan edukasi masyarakat mengenai layanan keuangan
4. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal akses layanan keuangan
5. Mengeratkan dan memperkuat sinergi atau kerja sama dari berbagai pihak baik bank maupun *nonbank* agar terciptanya kestabilan sistem keuangan

Memaksimalkan teknologi dan informasi untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.

Perbankan

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan dari usahanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa layanan bank lainnya (Kasmir, 2012:03). Berdasarkan cara menentukan harga, bank diklasifikasikan menjadi bank Konvensional dan bank Syariah. Menurut

Bank Konvensional, Menghimpun dana merupakan kegiatan yang biasanya disebut dengan *funding*. *Funding* atau kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan berbagai penawaran jenis simpanan. Menyalurkan dana adalah kegiatan yang menjual dana dari penghimpunan dana atau sering disebut dengan *lending* (Kasmir, 2012:35) *lending* dilakukan dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat atau biasa dikenal dengan kredit. Sedangkan perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang tata cara pengoperasiannya didasarkan pada tata cara ber-*muamalat* secara Islam, maksudnya mengacu pada ketentuan-ketentuan hadist dan Al-Qur'an (Sumar'in, 2012:49). Dalam pengoperasiannya, Perbankan Syariah maupun seluruh entitas harus menetapkan tujuan agar motivasi entitas atau perusahaan tersebut terbangun. Arti lain dari bank Syariah merupakan suatu lembaga yang menampung dana dari pihak yang memiliki dana lebih kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana untuk keperluan usaha atau produksi. Karena secara umum, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Setelah fungsi dari Perbankan Syariah atau entitas jelas, maka tujuan harus ditetapkan.

Dari fungsi dan tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa Perbankan Syariah memiliki peranan yang penting bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk permodalan sehingga dapat menciptakan pintu usaha bagi setiap masyarakat terutama bagi golongan rendah dan dapat membantu mengangkat perekonomian di Indonesia dengan cara menyerap tenaga kerja. Bank Syariah memiliki beberapa produk yang bervariasi bagi pembiayaan modal untuk UMKM, diantaranya :

1. Mudharabah
2. Musyarakah
3. Ijarah
4. Murabahah
5. Salam
6. Isthisna'

Hubungan Keefektifan Program Keuangan Inklusif Terhadap Perkembangan UMKM di Surabaya

Keuangan Inklusif merupakan upaya menghilangkan hambatan yang dilakukan oleh pihak bank maupun *nonbank* terhadap kemudahan akses dan memaksimalkan pemanfaatan layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya atau diterapkannya keuangan Inklusif ini, diharapkan penurunan angka kemiskinan yang drastis serta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Agar strategi keuangan Inklusif dapat tercapai, diperlukan adanya sinergi antara Pemerintah maupun sektor bank serta sektor lainnya. Keuangan Inklusif merupakan agenda yang sedang dibahas oleh pihak Internasional maupun pihak Nasional. Mengingat keuangan Inklusif memiliki banyak manfaat bagi semua sektor. Maka dari itu, pihak internasional seperti G20, ASEAN, AFI dan sebagainya mengeluarkan 9 prinsip untuk inovasi keuangan inklusif. Kesembilan prinsip tersebut meliputi Kepemimpinan, Keragaman, Inovasi, Perlindungan, Pemberdayaan, Kerjasama, Pengetahuan, Proposionalitas, dan Kerangka Aturan. Dalam menjalankan strateginya, terdapat 6 pilar strategi keuangan Inklusif. Keenam pilar tersebut meliputi Edukasi Keuangan, Fasilitas Keuangan Publik, Pemetaan Informasi Keuangan, Kebijakan atau Peraturan Pendukung, Fasilitas Intermediasi dan Distribusi, serta Perlindungan Konsumen. Bila berbicara mengenai keuangan Inklusif, maka peran Perbankan sangat dibutuhkan. Karena sektor Perbankan merupakan sektor yang menguasai keuangan sebesar 80% bila dibanding dengan sektor-sektor lain. Perbankan dinilai dapat memberikan kontribusi pembiayaan bagi masyarakat yang ingin membuka suatu usaha mikro atau UMKM. Di Indonesia, sektor Perbankan dibagi menjadi bank Konvensional dengan bank Syariah. Pada bank Konvensional, terdapat berbagai macam produk dan jasa yang

dapat dimanfaatkan oleh nasabah. Berdasarkan kebutuhannya, bank Konvensional juga menyediakan berbagai simpanan, kredit, dan jasa-jasa lainnya. Produk simpanan pada bank Konvensional meliputi simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Kredit pada bank Konvensional terdiri dari kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit profesi. Untuk jasa, bank Konvensional memberikan jasa berupa *transfer*, kliring, inkaso, kartu kredit, bank notes, bank garansi, bank draf, *letter of credit*, cek wisata dan jasa-jasa lainnya (Kasmir, 2012:37). Sedangkan pada Perbankan Syariah, produk pembiayaannya meliputi *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *istina* dan lain-lain (Umam, 2016:102). Pembiayaan dengan prinsip jual beli terdiri dari *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *istina*. Sedangkan *mudharabah*, *musyarakah* merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perbankan baik itu bank Konvensional maupun bank Syariah akan memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memilih jasa dan produk yang sesuai dengan kebutuhannya. tidak terkecuali juga untuk usaha kecil menengah sebagai pembiayaannya. Seperti yang diketahui, UMKM juga merupakan unsur penting dalam penyerapan tenaga kerja dan dapat membantu perekonomian Indonesia. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa seharusnya dengan adanya program keuangan Inklusif dengan keenam pilar atau strategi Nasional keuangan Inklusif, masyarakat lebih terbuka dan mau memanfaatkan secara maksimal layanan keuangan yang telah disediakan, terutama bagi masyarakat kecil yang produktif dan potensial. Karena dengan pemanfaatan yang maksimal masyarakat miskin dapat secara mandiri membuka suatu usaha dan pastinya akan berdampak yang baik pada penyerapan tenaga kerja sehingga ekonomi di Indonesia dapat membaik serta angka

kemiskinan akan menurun dan



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan pada beberapa pemilik UMKM di Surabaya baik itu yang menggunakan jasa layanan keuangan maupun tidak, dengan menganalisa efektivitas program keuangan Inklusif yang sedang digencarkan oleh pemerintah terkait dengan perkembangan UMKM di Surabaya. Adanya program keuangan Inklusif diharapkan dapat membuat masyarakat yang awalnya *unbanked* menjadi *banked* serta dapat membantu permasalahan yang banyak dihadapi oleh UMKM baru maupun UMKM yang hendak mengembangkan usahanya. Permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM yaitu berupa permodalan. Program keuangan Inklusif tidak akan terlepas dari sektor perbankan. Adanya berbagai macam produk yang diberikan oleh perbankan akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih produk perbankan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu, peneliti melakukan wawancara dan observasi kepada narasumber guna memperoleh data yang dibutuhkan, kemudian menganalisa data yang diperoleh dari narasumber. Tahap terakhir, peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif

kesejahteraan masyarakat akan meningkat. biasanya sering disebut dengan penelitian investigasi karena dalam melakukan penelitian ini, peneliti harus terjun secara langsung kelapangan dan berhadapan dengan informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan suatu pendekatan yang mencoba untuk mengungkapkan atau menjelaskan gambaran atau fenomena yang terjadi pada beberapa individu. Pendekatan ini dilakukan secara alami, sehingga tidak memiliki batasan untuk memahami dan memaknai fenomena yang sedang diujikan.

Batasan Penelitian

Setiap penelitian perlu adanya batasan penelitian agar hal-hal yang diteliti sesuai dengan tujuan awal atau dengan kata lain subyek dan objek yang dibahas dalam penelitian tidak melebar kemana-mana. Penelitian ini diadakan untuk mengetahui dampak perkembangan serta keefektifan program keuangan inklusif terhadap perkembangan UMKM di Surabaya. Jadi batasan dalam penelitian ini adalah beberapa UMKM yang ada di Surabaya baik yang melakukan pembiayaan di perbankan maupun tidak, serta UMKM disegala bidang.

Unit Analisis

Unit analisis merupakan serangkaian hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian sehingga peneliti dapat memfokuskan perhatian terhadap objek yang akan diuji. Unit analisis berisi tentang apa yang hendak diujikan atau bagian apa yang akan dianalisa. Penelitian ini menggunakan objek UMKM yang ada di Surabaya baik yang melakukan pembiayaan di perbankan maupun tidak. Unit analisis yang hendak diujikan ialah keefektifan program keuangan inklusif yang telah digencarkan oleh pemerintah demi kesejahteraan dan perkembangan UMKM.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Data primer memiliki definisi suatu data yang diambil atau diperoleh secara langsung ditempat kejadian atau dilapangan dengan melibatkan peneliti sehingga data tersebut dapat dikatakan data segar dalam penelitian ini, data primer yang difokuskan oleh peneliti adalah beberapa UMKM dengan berbagai bidang yang ada di Surabaya baik yang melakukan pembiayaan perbankan maupun tidak. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan cara wawancara, dan observasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian merupakan salah satu hal penting yang harus ada dan dilakukan. Penelitian baru akan berjalan dan dikatakan memperoleh kesimpulan jika teknik analisis telah ditentukan dan sudah diterapkan. Tujuan dari teknik analisis data adalah untuk menguji atau menganalisis data yang telah dikumpulkan sehingga nantinya data tersebut dapat disimpulkan atau diinterpretasikan. Penelitian kualitatif dilakukan secara alamiah atau asli tanpa dibuat-buat serta bersifat *researched* atau penemuan. Dalam penelitian kualitatif, instrument paling penting ialah peneliti. Maka dari itu, seorang peneliti harus memiliki pengetahuan serta wawasan yang luas dalam hal apapun terlebih pada objek yang hendak diteliti. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskripsi. Analisis diskripsi memiliki definisi suatu analisis dengan cara menggambarkan atau menerangkan kondisi dari objek penelitian dengan tujuan untuk menguji masalah yang dihadapi serta menarik kesimpulan dari pengujian tersebut. Langkah atau proses dari teknik analisis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dijelaskan sebagai berikut :

1. *Noema* memiliki arti suatu sisi yang bersifat objektif dari pendekatan fenomenologi. Maksud dari objektif ialah sesuatu dapat dilihat, dirasakan, dan sebagainya. Pada penelitian ini, sisi

objektif yang dimaksud adalah keefektivan program keuangan inklusif yang telah di gencarkan oleh pemerintah untuk perkembangan UMKM.

2. *Noesis* artinya suatu sisi subyektif dari pendekatan fenomenologi atau dengan kata lain tindakan yang dimaksud. Dalam penelitian ini, sisi subjektifnya ialah beberapa pemilik UMKM di Surabaya yang menilai bagaimana dampak program keuangan inklusif yang telah digencarkan oleh pemerintah serta efektivitas program keuangan inklusif bagi pemilik usaha mikro
3. *Intentional analysis* merupakan hubungan antara *noema* dan *noesis*. Jadi pada penelitian ini, hubungan antara *noema* dan *noesis* adalah hubungan antara perkembangan UMKM dengan keefektivan program keuangan inklusif yang telah di gencarkan oleh pemerintah.
4. *Epoche* yaitu menunda keputusan dari fenomena yang nampak tanpa memberikan suatu keputusan apapun terlebih dahulu. Sehingga penelitian dengan pendekatan fenomenologi ini bersifat natural tanpa campur tangan peneliti.
5. *Organisasi Data*, pada langkah ini peneliti mulai mengorganisasikan data serta gambaran secara menyeluruh mengenai fenomena yang telah dikumpulkan,serta membaca data lalu membuat catatan pinggir mengenai data yang diperkirakan perlu dan penting kemudian dilakukan pengkodean data
6. *Horizontaliting*, pada tahap ini peneliti menemukan dan mengelompokkan pernyataan responden dengan cara mempresepsikan bahwa semua pernyataan pada awalnya diperlakukan dengan nilai yang sama. pada tahap ini peneliti menghilangkan atau membuang pertanyaan dan pernyataan yang tidak relevan dengan topik, yang tersisanya hanya fenomenon yang tidak mengalami penyimpangan. Selanjutnya pernyataan yang benar dikumpulkan

- dan peneliti mengembangkan uraian pernyataan tersebut secara keseluruhan
7. Membangun Makna dan Penjelasan, pada tahap ini peneliti memberikan penjelasan secara naratif mengenai fenomena yang diteliti dan melakukan refleksi atas esensi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan peneliti.
 8. Membuat Laporan dan Kesimpulan, pada tahap ini peneliti membuat laporan tertulis berdasarkan temuan-temuan dilapangan dengan memberikan catatan lapangan tentang kondisi si responden atau informan serta suasana lingkungan ketika dilakukannya wawancara terhadap responden tersebut.

Kriteria Pengambilan Responden

Dalam Kriteria perlu ditetapkan dalam pengambilan responden. Karena dengan adanya kriteria yang telah ditentukan, maka peneliti memiliki batasan untuk menentukan responden atau narasumber mana yang dapat dijadikan sebagai perwakilan data untuk suatu penelitian. Berikut ini adalah kriteria atau alasan yang harus dipenuhi oleh responden yaitu :

1. Usaha merupakan milik sendiri dan bukan cabang.
2. Berkriteria UMKM sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
3. Usia UMKM minimal 2 tahun karena sudah memiliki pengalaman berbisnis.
4. Pemilik UMKM yang menggunakan jasa layanan keuangan maupun tidak.
5. Pemilik UMKM yang bersedia memberikan informasi terkait observasi

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Subyek Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah beberapa UMKM dengan bidang yang berbeda yang ada di Surabaya. Dalam penelitian ini, UMKM yang digunakan adalah usaha yang bergerak dibidang manufaktur seperti bengkel las yang membuat pagar, trails, canopy dan lainnya. Sedangkan untuk kuliner meliputi usaha

catering serta warung makan yang ada di kantin. Lalu untuk bidang kesehatan terdapat produsen jamu. Selain dibidang manufaktur, kuliner, dan jamu peneliti juga mengkaji UMKM berupa toko sembako dan warung kopi.

1. Bapak Heroe adalah seorang pemilik usaha bengkel las “Karya Muda”. Beliau menggunakan pinjaman kredit sebagai sumber modalnya. Nasabah bank BRI. Wawancara dilakukan pada tanggal 08 Desember 2016

2. Pak Feri selaku pemilik usaha warung kopi “Loro Ati” yang menggunakan kredit bank sebagai sumber modal. Nasabah bank Anglomas. Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 14.30 WIB

3. Ibu Lis, pemilik usaha sembako “Toko Lis”. Beliau menggunakan pinjaman kredit sebagai sumber modalnya. Nasabah bank BRI. Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 15.30 WIB

4. Ibu Dian, pemilik usaha catering dan warung makan “stan 08”. Beliau menggunakan tabungannya sendiri sebagai modal usaha. Wawancara dilakukan tanggal 14 Desember 2016 pukul 11.00 WIB

5. Pak Amin adalah pemilik usaha “Jamu Herbal An-Nahl”. Beliau menggunakan modal sendiri dari tabungan. Wawancara dilakukan tanggal 09 Desember 2016 pukul 19.30 WIB

6. Ibu Luluk adalah pemilik usaha sembako yang menggunakan tabungan sebagai sumber modal usahanya. wawancara dilakukan tanggal 09 Desember 2016 pukul 18.00 WIB.

Analisis Data dan Pembahasan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perkembangan UMKM yang ada di Surabaya setelah adanya program keuangan Inklusif yang sedang digencarkan oleh pemerintah saat ini atau dapat dikatakan mengukur efektivitas program keuangan inklusif. Data dikumpulkan dengan cara melakukan

wawancara terhadap beberapa UMKM diberbagai bidang yang ada di Surabaya serta melakukan pengamatan disetiap objek yang sedang diteliti. Pertanyaan yang digunakan untuk wawancara bersifat semi struktur sehingga peneliti harus terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan yang akan di ajukan.

Keuangan Inklusif melalui Edukasi Keuangan

Program Edukasi Keuangan merupakan fasilitas yang diberikan perbankan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah mengenai pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan misalnya seperti membuat pencatatan dan pembukuan. Dalam beberapa wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan baik itu yang menggunakan jasa layanan keuangan bank maupun tidak, peneliti menemukan kesimpulan jika program edukasi keuangan berupa keterampilan dan pengetahuan akan pencatatan dan pembukuan yang seharusnya diterapkan oleh pihak perbankan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah masih belum efektif. Namun, pihak perbankan masih memberikan kemudahan agar usaha kecil mendapatkan haknya berupa pinjaman kredit untuk usahanya dengan cara dibuatkannya laporan keuangan oleh pihak bank.

Keuangan Inklusif melalui Fasilitas Keuangan Publik

Program yang harus dijalankan oleh perbankan diantaranya Fasilitas Keuangan Publik. Program Fasilitas Keuangan Publik yang mana akan tercapai jika Usaha Mikro Kecil Menengah mendapatkan bantuan berupa pemberdayaan UMKM. pemberdayaan UMKM meliputi pelatihan kewirausahaan, teknologi, informasi serta akses pemasaran. Dalam beberapa wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan baik itu yang menggunakan jasa layanan keuangan bank maupun tidak, peneliti menemukan kesimpulan bahwasanya program

Fasilitas Keuangan Publik yang berfokus pada pemberdayaan UMKM ini masih belum diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Ini merupakan tugas rumah yang harus dikerjakan oleh perbankan. Pasalnya program ini merupakan program yang banyak memberikan manfaat dan bagus untuk mengambil hati masyarakat. Semakin banyak usaha mikro kecil yang mengetahui program pemberdayaan UMKM ini, akan semakin besar juga peluang untuk menarik hati masyarakat agar mau menggunakan jasa layanan keuangan atau berkontribusi di dalamnya

Keuangan Inklusif melalui Pemetaan Informasi Keuangan

Program Pemetaan Informasi Keuangan yang mana akan terwujud jika usaha kecil mendapatkan layanan kredit yang lebih sederhana. Dalam beberapa wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan baik itu yang menggunakan jasa layanan keuangan bank maupun tidak, peneliti menemukan kesimpulan jika Ketidak tahuan usaha mikro kecil ini lah salah satu hal yang menyebabkan mereka enggan untuk menggunakan jasa layanan keuangan dari perbankan. Mereka masih menganggap bahwa pengajuan kredit di bank sangat rumit dengan menggunakan jaminan. Sedangkan pada realitanya tidak sedikit perbankan yang menawarkan kreditnya dengan bunga yang kecil atau bahkan tanpa menggunakan anggunan atau jaminan. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh perbankan. Pihak bank harus lebih gencar lagi dalam mengedukasi usaha mikro kecil mengenai produk perbankan yang sesungguhnya.

Keuangan Inklusif melalui Kebijakan yang Mendukung

Program berikutnya ialah program kebijakan yang mendukung akan tepat sasaran jika Usaha Mikro Kecil Menengah mendapatkan sosialisasi produk jasa layanan keuangan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam beberapa

wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan baik itu yang menggunakan jasa layanan keuangan bank maupun tidak, peneliti menemukan kesimpulan jika sosialisasi mengenai produk dan jasa perbankan memang belum optimal. Hal ini terbukti dengan minimnya pengetahuan dari kebanyakan pemilik usaha mikro yang belum menggunakan jasa layanan keuangan. bahkan ketika ditanya mengenai kredit sederhana yang ditawarkan oleh perbankan, kebanyakan dari pemilik usaha *nonbanked* tidak mengetahuinya. Strategi nasional keuangan inklusif memiliki keterkaitan diantara setiap pilar. Sehingga pihak bank harus menjalankan dan menerapkan strategi tersebut dengan optimal agar lapisan masyarakat yang belum menggunakan jasa layanan keuangan dapat dengan yakin dan tidak takut untuk menjadi masyarakat yang *banked*.

Keuangan Inklusif melalui Fasilitas Forum Intermediasi

Program fasilitas intermediasi dan saluran distribusi akan tercapai jika usaha kecil mendapatkan fasilitas forum intermediasi yang mempertemukan kelompok masyarakat produktif dengan lembaga keuangan. Dalam beberapa wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan baik itu yang menggunakan jasa layanan keuangan bank maupun tidak, peneliti menemukan kesimpulan jika beberapa program dari keuangan inklusif telah diterapkan oleh perbankan, namun jangkauannya belum luas. Kebanyakan umkm masih belum merasakan program yang sedang digencarkan oleh perbankan ini. Sehingga tidak sedikit umkm yang memutuskan untuk enggan menggunakan jasa layanan keuangan. jika seandainya program dari keuangan inklusif ini dapat diterapkan oleh perbankan secara maksimal dan menyeluruh, kemungkinan untuk membuat masyarakat *unbanked* untuk tertarik pun semakin besar.

Keuangan Inklusif melalui Perlindungan Nasabah

Keuangan Inklusif melalui Perlindungan Nasabah dapat tercapai jika nasabah mendapatkan perlindungan berupa pemantauan serta penampungan saran oleh pihak perbankan. Dalam beberapa wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan baik itu yang menggunakan jasa layanan keuangan bank maupun tidak, peneliti menemukan kesimpulan jika perlindungan berupa pemantauan yang dilakukan oleh perbankan masih belum maksimal namun sudah diterapkan serta penampungan saran juga telah diberikan namun dari pihak nasabah kebanyakan enggan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Keuangan Inklusif sebagai Imbas Perkembangan Usaha

Dari beberapa pernyataan informan di atas, baik yang menggunakan jasa layanan keuangan maupun tidak, mengungkapkan bahwasanya perkembangan usaha mereka tidak bergantung dari sumber mana modal yang digunakan namun dari pengelolaan yang baik. Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang mana ada beberapa umkm dari informan yang menggunakan bank sebagai sumber modal, namun perkembangan usaha beliau tidak terjamin selalu berkembang. Ada juga informan yang mana belum menggunakan jasa layanan keuangan namun usahanya selama tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan.

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

1. Beberapa program keuangan inklusif yang sedang di gencarkan oleh pemerintah telah diterapkan namun masih belum efektif. Terbukti dari beberapa UMKM yang belum maupun sudah menggunakan pinjaman modal yang menyatakan bahwa kurangnya pendekatan antara pihak bank dengan UMKM. Alasan dari beberapa informan yang belum menggunakan jasa layanan

keuangan dari perbankan adalah karena takut tidak bisa membayar angsuran. Hal ini harus diantisipasi oleh pihak bank untuk meyakinkan masyarakat agar tidak perlu khawatir. Ada berbagai strategi yang harus diterapkan oleh perbankan seperti memberikan keterampilan dan pelatihan pembukuan sehingga keuangan usaha akan terkelola dengan baik. Selain itu bank juga memiliki produk kredit yang lebih sederhana. Yang mana bunga dari kredit tersebut jauh lebih kecil atau bahkan produk kredit berupa tanpa anggunan. Bank juga memberikan fasilitas berupa pemberdayaan UMKM dan perlindungan nasabah yang mana harus diterapkan secara optimal untuk menarik simpati masyarakat agar mau berkontribusi dalam jasa layanan keuangan dari perbankan

2. Rata-rata alasan UMKM yang menggunakan pinjaman modal pada perbankan hanya karena butuh bukan karena adanya program keuangan inklusif
3. Perkembangan suatu usaha tidak ditentukan dari mana memperoleh modal, melainkan dari pengelolaan yang baik
4. Beberapa hal yang membuat usaha kecil enggan melakukan pinjaman modal di bank yaitu persepsi rumit dan sulit bila menggunakan pinjaman modal dari bank (kurangnya edukasi mengenai jasa layanan keuangan).
5. Perbankan kurang menerapkan strategi nasional keuangan inklusif secara menyeluruh kepada usaha mikro kecil

Keterbatasan Penelitian

Setiap penelitian, pasti terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi :

1. Situasi dimana wawancara berlangsung kadang kurang kondusif atau ramai sehingga proses wawancara sedikit terganggu
2. Adanya pembeli atau konsumen saat proses wawancara berlangsung sehingga wawancara harus ditunda untuk beberapa menit
3. Tidak diperkenankannya menggunakan recorder saat wawancara oleh informan, sehingga wawancara dilakukan secara manual menggunakan peralatan tulis
4. Dalam menjawab pertanyaan, terkadang informan kurang detail dalam menjelaskannya atau bahkan menyimpang dari topic yang dibahas.

Saran

Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Diharapkan mempertimbangkan untuk melakukan penelitian mengenai keuangan Inklusif, karena kurangnya referensi yang didapat.
2. Menambah 3 sampai 5 Informan penelitian agar hasil lebih akurat dan lebih bervariasi
3. Diharapkan mencari referensi mengenai pertanyaan sesuai topik yang lebih menarik, yang akan diajukan kepada informan.

Bagi Perbankan

1. Pihak perbankan sebaiknya melakukan sosialisasi dalam rangka pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai program keuangan inklusif yang seharusnya disalurkan oleh perbankan.

Bagi Pemerintah

1. Melakukan pengawasan kepada pihak perbankan serta UMKM terkait diterapkannya program keuangan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, Dewi. 2013. "Peranan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Bagi Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 1.
- Ascarya. 2012. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bank Indonesia. 2014. *Booklet Keuangan Inklusif Departemen Perkembangan Akses Keuangan dan UMKM*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dian. Wawancara Pribadi di Jl. Wonorejo Permai Utara III NO16, Wonorejo Rungkut. Surabaya, 14 Desember 2016 pukul 11.00 WIB.
- Ghandiar, Novan. 2013. "Peran Kredit yang Disalurkan oleh BPR Bank Pasar Terhadap Perkembangan Usaha Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Pontianak" *Jurnal Ekonomi*.
- Haras, Emad ., et al. 2014. "The Influence of Finance on Performance of Small and Medium Enterprises (SMES)". *International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT)*.
- Kara, Muslimin. 2013. "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". *Jurnal Ahkam*: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013.
- Kasmir. 2012. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khajidini, Kladiola. 2014. "Small and Medium Sized Entreprises: Growth Factors". *European Scientific Journal*.
- Khatimah, Khusunul. 2016. "Strategi Implementasi Inklusi dan Literasi Keuangan Pada BMT Syariah Riyal Kota Bekasi.". *Jurnal Ekonomi*.
- Lis. Wawancara Pribadi di Jl. Kebraon gg Mangga. Surabaya, 14 Desember 2016 pukul 15.30 WIB.
- Luluk. Wawancara Pribadi Jl. Kedurus gg 3B. Surabaya, 09 Desember 2016 pukul 18.00 WIB.
- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Murwanti, Sri dan Muhammad, Sholehudin. 2013. "Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro di Wonogiri". ISBN: 978-979-636-147-2.
- Nengsih, Novia. 2015. "Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia". *Jurnal Etikonomi* Volume 14 (2)
- Njoora, Livingston. 2014. "Effects of Microfinance Credits on SMEs in Ngong of Kajiado County in Kenya". *International Journal of Social Sciences and Entrepreneurship*.
- Putrina, Aisyah. 2014. "Strategi Yang Dilakukan Oleh Perbankan Syariah Dalam Mendukung Program Keuangan Inklusif Untuk Perkembangan UMKM". *Jurnal ekonomi*.
- Setiawan, Feri. Wawancara Pribadi di Jl. Kebraon gg 2. Surabaya, 14 Desember 2016 pukul 14.30.
- Shomad dan Usanti. 2014. *Transaksi bank syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soebagyo, Heroe. Wawancara Pribadi di Jl Kebraon Mastrip. Surabaya, 08 Desember 2016.
- Sodiq, Ali Amin. Wawancara Pribadi Jl. Kedurus gg 3b no. 39. Surabaya, 08 Desember 2016.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umam. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang No 20 pasal 1 ayat 2
- Yaya. 2013. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*

- Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusuf, Basir. 2014. "Islamic Financing: A Panacea to Small and Medium Scale Enterprises Financing Problems in Nigeria" *European Scientific Journal*.
- Yusuf dan Wiroso. 2012. *Bisnis Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Wiroso. 2010. *Produk Perbankan Syariah: Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia*. Jakarta: LPFE Usakti
- www.bi.go.id

